LAMPIRAN XXVI
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR / /K/411.013/2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

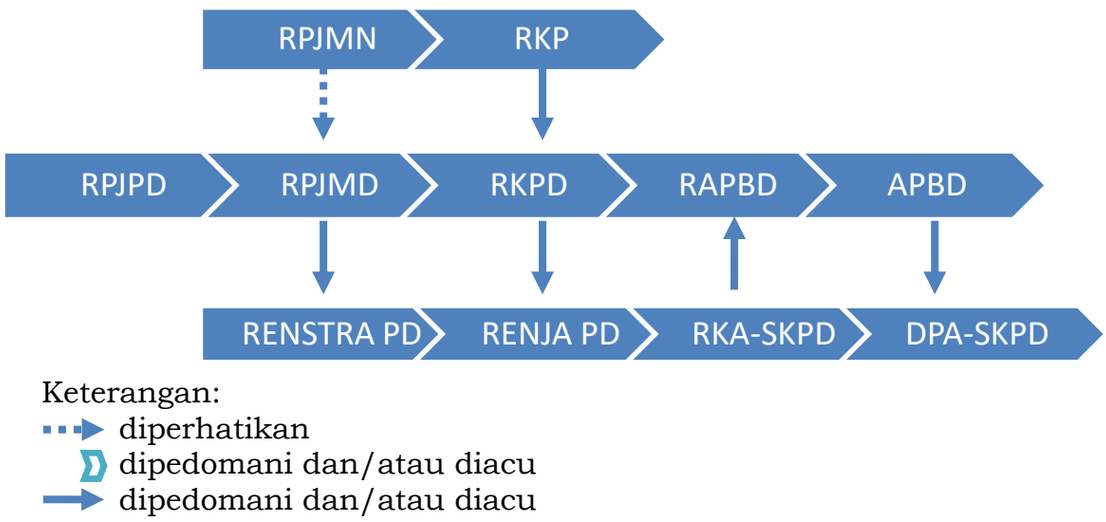
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
diperhatikan
dipedomani dan/atau diacu
dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024. tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.

18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1317 Tahun 2023 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045;

30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2026 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
5.2. Rencana Tindak Lanjut

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja BPKAD sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh BPKAD melalui capaian kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Triwulan III dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPKAD dan Pencapaian Renstra BPKAD s/d Tahun 2024

(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (RPD) 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5					**Urusan Pemerintahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**									
5	**02**				**Bidang Urusan Keuangan**									
5	**02**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) BPKAD**	**86**	**80**	**82**	**80**	**98 %**	**82**	**80**	**98%**
5	**02**	**01**	**201**		**Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun**	**100%**	**100%**	**100%**	**47%**	**83%**	**100%**	**85%**	**98%**
5	02	01	201	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	15 dok	3 dok	5 dok	2 dok	40 %	5 dok	2	40%
5	02	01	201	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100 %	1 dok	1	100%
5	02	01	201	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1	100%
5	02	01	201	04	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1	100%

						koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD								
5	02	01	201	05	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dok	1 dokumen	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1	100%
5	02	01	201	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	6 laporan	4 laporan	4 laporan	100 %	4 laporan	3	75%
5	02	01	201	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	16 laporan	3 laporan	3 laporan	3 laporan	100%	3 laporan	3	100%
5	**02**	**01**	**202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**100%**	**71%**	**100%**	**62%**	**85%**	**100%**	80%	79%
5	02	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	138 org/bln	42 org/bl	46 org/bl	42 org/bl	90%	46 org/bl	39	87%
5	02	01	202	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1	100%
5	02	01	202	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	51 laporan	21 laporan	17 laporan	17 laporan	100%	17 laporan	12	68%
5	**02**	**01**	**203**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**40%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**50%**	**50%**

						Perangkat Daerah yang disusun								
5	02	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	6 laporan	3 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	1	50%
5	**02**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat**	**100%**	**49 %**	**75 %**	**215 %**	**215%**	**100%**	**80%**	**80%**
5	02	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2 paket	-	-	-	-	-	-	-
5	02	01	205	10	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	450 org	214 org	150 org	324 org	220%	150 org	0	0%
5	02	01	205	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	450 org	186 org	150 org	243 org	165%	150 org	166	141%
5	**02**	**01**	**206**		**Administrasi Umum**	**Persentase fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan**	**100%**	**53%**	**90%**	**68%**	**76%**	**100%**	**26%**	**30%**
5	02	01	206	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	2	40%
5	02	01	206	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	3 paket	8 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1	20%
5	02	01	206	04	Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	3 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	3	38%
5	02	01	206	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 paket	5 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1	50%
5	02	01	206	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	1	50%
5	02	01	206	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	30 laporan	7 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	10 laporan	5	120%

5	02	01	206	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	108 laporan	70 laporan	36 laporan	36 laporan	100%	36 laporan	25	41%
5	02	01	206	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	600 dok	12 dok	200 dok	208 dok	108%	200 dok	150	75%
5	02	01	206	11	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 dok	-	2 dok	-	0%	2 dok	0	0%
5	**02**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD SKPD yang diadakan**	**100%**	**100%**	**100%**	**114%**	**114%**	**100%**	**67%**	**72%**
5	02	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	345 unit	7 unit	115 unit	168 unit	146%	115 unit	4	44%
5	02	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	132 unit	23 unit	44 unit	45 unit	102%	44 unit	6	100%
5	**02**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**100%**	**100%**	**100%**	**115%**	**115%**	**100%**	**127%**	**127%**
5	02	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	9 laporan	4 laporan	3 laporan	4 laporan	125%	3 laporan	5	127%
5	02	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	108 laporan	24 laporan	36 laporan	36 laporan	100%	36 laporan	15	116%
5	02	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	9	77%
5	**02**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD SKPD yang dipelihara**	**100%**	**100%**	**100%**	**120%**	**120%**	**100%**	**116%**	**116%**
5	02	01	209	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	57 unit	18 unit	19 unit	23 unit	121%	19 unit	19	100%
5	02	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	1	100%

5	02	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	30 unit	30 unit	10 unit	12 unit	110%	10 unit	8	20%
5	02	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1	100%
5	**02**	**02**			**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai Standar**	**100%**	**62%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**85%**	**85%**
5	**02**	**02**	**201**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase dokumen anggaran daerah (APBD dan P. APBD) yang disusun tepat waktu**	**100%**	**84%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**85%**	**85%**
5	02	02	201	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	6 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	1	100%
5	02	02	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	6 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	1	100%
5	02	02	201	03	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	-	-	-	-	-	-		
5	02	02	201	04	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	-	-	-	-	-			
5	02	02	201	05	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	-	-	-	-	-			
5	02	02	201	06	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	-	-	-	-	-			
5	02	02	201	07	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	6 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2	100%
5	02	02	201	08	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P,APBD	Jumlah Perda tentang P.APBD dan Perkada tentang Penjabaran P. APBD	15 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	2	50%
5	02	02	201	09	Koordinasi dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	-	-	-	-	-	-		

5	02	02	201	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-		
5	**02**	**02**	**202**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan pengelolaan keuangan daerah**	**100%**	**57%**	**100%**	**71%**	**71%**	**100%**	**148%**	**188%**
5	02	02	202	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	27.000 dok	7.453 dok	9.000 dok	8.948 dok	94%	9.000 dok	9271	123%
5	02	02	202	03	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	624 dok	208 dok	208 dok	416 dok	200%	208 dok	208	100%
5	02	02	202	05	Koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	276 dok	95 dok	92 dok	92 dok	100%	92 dok	82	88%
5	02	02	202	06	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1	100%
5	02	02	202	09	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D instansi terkait	1.950 dok	295 dok	650 dok	660 dok	110%	650 dok	576	85%
5	02	02	202	10	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	Jumlah dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan	15 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	14	280%

						pertanggungjawaban subkegiatan							
5	**02**	**02**	**203**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase dokumen Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun**	**100%**	**60%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**77%**	**77%**
5	02	02	203	02	Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	33 dok	18 dok	11 dok	11 dok	100%	11 dok	5	46%
5	02	02	203	03	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	3	75%
5	02	02	203	05	Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Raperkada tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2	100%
5	02	02	203	06	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1	100%
5	02	02	203	07	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	6 dok	1 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	1	50%
5	02	02	203	09	Penyusunan Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan dan panduan teknis operasional		-	-	-	-	-		

						penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah								
5	02	02	203	10	Penyusunan Sistem dan prosedur akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Sistem dan prosedur akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-		
5	02	02	203	11	Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	450 org	104 org	150 org	155 org	110%	150 org	50	301%
5	**02**	**02**	**204**		**Penunjang Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**Persentase penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan**	**100%**	**83%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**75%**	**75%**
5	02	02	204	08	Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	18 laporan	7 laporan	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	3	75%
5	02	02	204	09	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah penyaluran dana darurat dan mendesak yang dilaksanakan	12 laporan	3 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	3	75%
5	02	02	204	10	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Jumlah penyaluran belanja bagi hasil Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	6 laporan	1 laporan	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	0	0%
5	**02**	**02**	**205**		**Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah**	**Persentase OPD yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD**	**100%**	**58%**	**100%**	**24%**	**24%**	**100%**	**10%**	**10%**
5	02	02	205	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SIPD bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	300 org	104 org	100 org	24 org	24%	100 org	10	10%
5	**02**	**03**			**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar**	**100%**	**74%**	**100%**	**107%**	**107%**	**100%**	**77%**	**77%**

5	**02**	**03**	**201**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai standar**	**100%**	**74%**	**100%**	**107%**	**107%**	**100%**	**77%**	**77%**
5	02	03	201	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	156 dok	52 dok	52 dok	52 dok	100%	52 dok	52	100%
5	02	03	201	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan BMD	156 dok	52 dok	52 dok	52 dok	100%	52 dok	52	100%
5	02	03	201	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	3 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	0	0%
5	02	03	201	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD	156 laporan	52 laporan	52 laporan	52 laporan	100%	52 dok	52	100%
5	02	03	201	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventaris (LHI) Barang Milik Daerah	156 laporan	52 laporan	52 laporan	52 laporan	100%	52 laporan	0	0%
5	02	03	201	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah hasil pengamanan BMD	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	3	75%
5	02	03	201	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil penilaian BMD dan hasil koordinasi penilaian BMD	90 laporan	27 laporan	30 laporan	30 laporan	100%	30 laporan	26	87%
5	02	03	201	10	Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	78 dok	50 dok	26 dok	13 dok	50%	26 dok	26	100%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra BPKAD s/d Triwulan III Tahun 2024 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	85%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Ketepatan waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD	-	-
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	77%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Kerjasama Tim, Baik BPKAD, BPN dan Pemerintah Desa	-	-

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama *(core bussiness)* dan indikator kinerja pelayanan BPKAD berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

No.	IKU	SPM	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Opini BPK terhadap LKPD		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
No.	IKK	SPM	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Indikator Kinerja Utama : Opini BPK terhadap LKPD dapat direalisasikan sesuai dengan renstra yaitu mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), hal ini memberikan indikasi bahwa LKPD Kabupaten Nganjuk telah dilaporkan sesuai standar akuntasi pemerintahan

Indikator Kinerja Kunci : Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan keuangan daerah sesuai standar dan Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan barang milik daerah sesuai standar. Kedua IKU dapat direalisasikan sesuai dengan renstra yaitu 100%, hal ini memberikan indikasi bahwa secara keseluruhan pengelola keuangan dan aset daerah telah memahami standar yang ditetapkan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat kinerja pelayanan BPKAD secara umum telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra 2024-2026.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapai Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

a. Pengelola keuangan dan aset daerah belum mempunyai pengetahuan yang memadai dalam penyusunan dokumen penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset daerah.
b. Pemahaman terkait tupoksi dan jumlah tenaga pengelola keuangan di SKPD masih kurang, sehingga pengelola keuangan di SKPD arus merangkap tugas yang bukan menjadi tupoksinya.
c. Belum tertibnya pelaporan barang inventaris di SKPD yang perolehannya berasal dari selain APBD Kabupaten Nganjuk (Hibah, Sumbangan, dsb).
d. Sulitnya penyelesaian status kepemilikan BMD khususnya aset tanah karena pelaksanaan sertifikasi aset tetap tanah merupakan proses yang saling terkait dan harus melibatkan beberapa pihak (antara lain BPN, desa/kelurahan, kecamatan, tetangga, dan ahli waris). Hal ini, secara langsung sangat berpengaruh terhadap percepatan penyelesaian sertifikasi dan realisasi penyerapan anggaran

Tujuan Pembangunan Kabupatan Nganjuk sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah "**MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK "** dan sasarannya adalah "**MENINGKATKAN BIROKRASI YANG AKUNTABEL DAN EFEKTIF, SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA".** Untuk itu, BPKAD mempunyai tugas dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut dengan meningkatkan tata kelola keuangan daerah dengan indikator opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.

11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi *(means of implementation)* dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.6
Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2024

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Catatan Penting
				Target*)	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Target 16.6: Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat									
	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		
2.	Target 17.1: Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.									
	Rasio kemandirian keuangan daerah	Persentase	17.82 %	14.23 %	14.98%	19.50 %		19.80 %		

Sumber: Hasil Evaluasi Capaian TPB Perangkat Daerah Tahun 2024

Berkenaan dengan tugas dan fungsi BPKAD memberikan kontribusi terhadap tujuan ke-16

2.3.3 Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Nganjuk, ada beberapa hal yang diharapkan oleh BPKAD dalam kurun waktu tiga tahun kedepan yaitu :

1. **Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis kinerja**

   Adanya paradigma baru dalam peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada sistem akuntansi keuangan daerah di seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah maka diperlukan adanya peningkatan sumber daya manusia yang profesional dengan integritas tinggi dalam menangani pengelolaan dan penatausahaan keuangan. Hal tersebut untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.

   Diharapkan dalam tiga tahun kedepan di setiap SKPD telah terpenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan Ekonomi terutama Akuntansi untuk mempertahankan target Pemerintah Daerah dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan mendapat opini BPK ”**Wajar Tanpa Pengecualian**”. Faktor kunci untuk memperoleh predikat WTP dari BPK adalah meningkatnya pemahaman sumber daya pengelola keuangan dan mengimplementasikan dalam mengelola dokumen sumber keuangan, mencatat dan menyajikan dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

2. **Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

   Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar. Untuk mendukung terwujudnya tata kelola Barang Milik Daerah sebagai sarana dan prasarana penunjang Kinerja Pemerintah di Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan kebijakan-kebijakan strategis terkait peningkatan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Nganjuk.

Adapun kebijakan strategis untuk tiga tahun kedepan dalam rangka peningkatan pengelolaan barang milik daerah Kabupaten Nganjuk yaitu peningkatan pengelolaan barang milik daerah berbasis teknologi elektronifikasi yang meliputi siklus pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran

   Dalam hal ini mengatur mengenai rencana kebutuhan barang, rencana pemeliharaan barang, standardisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah dan standardisasi harga.

b. Pengadaan

   Dalam hal ini mengatur mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penerimaan barang yang berasal dari sumbangan dan/atau kewajiban dari pihak ketiga.

c. Penerimaan,Penyimpanan dan Penyaluran

   Dalam hal ini mengatur mengenai penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, tugas dan tanggung jawab penyimpan barang serta administrasi penyimpanan barang.

d. Penggunaan

   Dalam hal ini mengatur mengenai status penggunaan barang milik daerah baik untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi.

e. Penatausahaan

   Dalam hal ini mengatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab Pengelola dan Kepala SKPD sebagai Pengguna dalam pelaksanaan pendaftaran, pencatatan, pembukuan, inventarisasi dengan cara sensus barang daerah, cara pembuatan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris dan pembuatan Kartu Inventaris Ruangan dan Kartu Inventaris

Barang serta sistem pelaporan.

f. Pemanfaatan

Dalam hal ini mengatur mengenai pemanfaatan barang daerah melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna.

g. Pengamanan dan Pemeliharaan

Dalam hal ini mengatur mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, fisik dan hukum serta tertib administrasi pemeliharaan barang.

h. Penilaian

Dalam hal ini mengatur mengenai penilaian barang milik daerah baik dilakukan oleh Tim maupun oleh lembaga independent bersertifikat dibidang penilaian barang milik daerah.

i. Penghapusan

Dalam hal ini mengatur mengenai penghapusan dari daftar barang pengguna dan kuasa pengguna barang serta dari daftar barang milik daerah.

j. Pemindahtanganan

Dalam hal ini mengatur mengenai pemindahtanganan sebagai tindak lanjut penghapusan meliputi penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal.

k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Dalam hal ini mengatur mengenai pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Melakukan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Penggunaan Barang Milik Daerah pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

l. Pembiayaan

Dalam hal ini mengatur mengenai biaya pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dan tunjangan/insentif untuk penyimpan/pengurus barang.

m. Tuntutan Ganti Rugi

Dalam hal ini diuraikan mengenai penyelesaian kerugian daerah melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi.

Rencana untuk penyelesaian yang dapat ditempuh adalah pemberian sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan terhadap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah.

2.3.4 Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

- Belum adanya kemandirian fiskal sehingga dalam penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan masih terkendala terkait pagu anggaran daerah terutama dalam hal peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan aset daerah;
- Penguatan komitmen serta kapasitas sumber daya manusia, pengelola keuangan dan aset daerah;
- Penyusunan dan implementasi standar pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- Percepatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi;
- Barang inventaris di SKPD yang belum tertib pelaporannya;
- Belum terklasternya persyaratan pengajuan sertifikat aset milik Pemda sepertiprogram PTSL ;
- Belum tertibnya persyaratan untuk pensertifikatan tanah-tanah SD yang menempati TKD;
- Membentuk Tim khusus IT mempermudah untuk koordinasi dengan bank bilamana ada gangguan teknis/jaringan SIPD;
- Adanya sosialisasi terkait produk di KKPD OPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah **“Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik”.**

Proses reviu rancangan awal RKPD Tahun 2026 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2026 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut :

Tabel 2.7
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Nilai SAKIP	86	9.024.283.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Nilai SAKIP	82	7.798.155.811,35	
I.	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	100%	55.659.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	100%	67.336.100	
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dok	8.349.000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	16.154.000	
2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	7.792.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.948.300	
3.	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	7.792.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	5.197.000	
4.	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	5.566.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	4.620.700	
5.	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	5.566.000	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	4.770.000	

6.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	9.462.000	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	13.795.700	
7.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	11.132.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	18.850.400	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	6.991.516.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	6.236.701.683,45	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 org/bln	6.977.602.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 org/bln	6.200.624.583,45	
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan aporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	7.792.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan aporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	18.092.500	
3.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17 laporan	6.122.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	17 laporan	17.954.600	
III.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase laporan penatausahaan BMD SKPD yang tersusun	100	7.792.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase laporan penatausahaan BMD SKPD yang tersusun	2 laporan	6.600.000	
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	2 laporan	7.792.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan BMD pada SKPD	2 laporan	6.600.000	
IV.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	177.002.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	146.573.300	

1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Nganjuk	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Nganjuk	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		-	
2.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 orang	77.814.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 orang	38.098.300	
3.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150 orang	99.188.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	100 orang	108.475.000	
V.	Administrasi Umum	Kab. Nganjuk	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah	100%	379.575.000	Administrasi Umum	Kab. Nganjuk	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah	100%	242.124.528	
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	6.679.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	4.720.654	
2.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Nganjuk	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	5.566.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Nganjuk	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	4.740.150	
3.	Penyediaan bahan logistik	Kab. Nganjuk	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	94.714.000	Penyediaan bahan logistik	Kab. Nganjuk	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	101.215.074	
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	33.396.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	8.182.800	
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dok	551.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dok	3.000.000	
6.	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 laporan	16.698.000	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 laporan	3.176.050	

7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	191.687.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	110.386.000	
8.	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	200 dok	16.698.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	200 dok	6.703.800	
9.	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok	8.627.000	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok	0	
VI.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase BMD SKPD yang diadakan	100%	714.572.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase BMD SKPD yang diadakan	100%	82.745.999,90	
1.	Pengadaan Mebel	Kab. Nganjuk	Jumlah unit mebel yang disediakan	115 unit	375.781.000	Pengadaan Mebel	Kab. Nganjuk	Jumlah unit mebel yang disediakan	9 unit	0	
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	44 unit	338.791.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10 unit	82.745.999,90	
VII.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	357.664.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia	100%	695.082.500	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	3 laporan	4.452.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	3 laporan	2.050.000	
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	173.663.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	240.000.000	
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	179.549.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	453.032.500	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase BMD pada SKPD yang dipelihara	100%	340.503.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase BMD pada SKPD yang dipelihara	100%	320.991.700	
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan	Kab. Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	19 unit	123.537.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak	Kab. Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang	18 unit	137.933.500	

	perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan			dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan			
2.	Pemeliharaan Mebel	Kab. Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	10 unit	1.102.000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	60 unit	4.996.200	
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	10 unit	111.322.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	60 unit	83.590.000	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	94.624.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	94.472.000	
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kab. Nganjuk	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai Standar	100%	549.691.007.000	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase kepatuhan OPD dalam penyusunan dokumen keuangan daerah sesuai Standar	100%	257.191.252.153,82	
IX	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Nganjuk	Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran daerah (APBD dan P. APBD)	100%	2.024.130.000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab. Nganjuk	Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran daerah (APBD dan P. APBD)	100%	1.028.466.953	
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dok	454.130.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dok	227.441.050	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 dok	465.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 dok	233.705.950	
3.	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi			Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi			
4.	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi			Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi			
5.	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi			Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi			
6.	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi			Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA SKPD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi			

7.	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dok	475.000.000	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dok	272.673.900	
8.	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P,APBD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perda tentang P. APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P. APBD	5 dok	530.000.000	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P,APBD	Kab. Nganjuk	Jumlah Perda tentang P. APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P. APBD	5 dok	294.646.053	
9.	Koordinasi dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran			Koordinasi dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran			
10.	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	208 orang	100.000.000	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	208 orang	0	
X	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Nganjuk	Terlaksananya pembinaan OPD dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	777.609.000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kab. Nganjuk	Terlaksananya pembinaan OPD dalam pengelolaan keuangan daerah	100%	283.480.850	
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	9000 dok	371.991.000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	9000 dok	187.340.200	
2.	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	208 dok	125.031.000	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	208 dok	36.005.950	
3.	Koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	92 dok	80.511.000	Koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	92 dok	12.199.200	

4.	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank	1 dok	38.631.000	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank	1 dok	12.806.000	
5.	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	650 dok	22.092.000	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	650 dok	8.781.500	
6.	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	Kab. Nganjuk	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	5 dok	139.353.000	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	Kab. Nganjuk	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	5 dok	26.348.000	
XI	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase dokumen Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	100%	855.627.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase dokumen Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	100%	326.670.700	
1.	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah			Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah			
2.	Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	11 dok	88.050.000	Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan pendapatan-LO dan beban	11 dok	13.313.000	

3.	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	4 laporan	103.300.000	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	4 laporan	31.570.000	
4.	Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dok	604.100.000	Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dok	266.757.700	
5.	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 dok	11.250.000	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	dihapus	dihapus	
6.	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	2 dok	11.250.000	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	2 dok	6.025.000	
7.	Penyusunan Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah			Penyusunan Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah			
8.	Penyusunan Sistem dan prosedur akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah Sistem dan prosedur akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			Penyusunan Sistem dan prosedur akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah Sistem dan prosedur akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			
9.	Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan	150 orang	37.677.000	Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban	54 SKPD 10 Lap	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan akuntansi pelaporan	150 orang	9.005.000	

	pemerintah Kabupaten/Kota		akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota			pemerintah Kabupaten/Kota		dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota			
XII	Penunjang Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kab. Nganjuk	Terlaksananya penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	545.937.684.000	Penunjang Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Kab. Nganjuk	Terlaksananya penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah	100%	255.532.428.650,82	
1.	Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6 laporan	464.453.904.000	Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6 laporan	217.513.169.849	
2.	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	4 laporan	65.575.052.000	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	4 laporan	10.423.615.401,82	
3.	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	2 laporan	15.908.728.000	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	2 laporan	27.595.643.400	
XIII	Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah	Kab. Nganjuk	Persentase peserta yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD	100%	95.957.000	Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah	Kab. Nganjuk	Persentase peserta yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD	100%	20.205.000	
1.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SIPD bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	95.957.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SIPD bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	20.205.000	
XIV	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kab. Nganjuk	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai Standar	100%	2.275.000.000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Persentase OPD yang menerapkan pengelolaan BMD sesuai Standar	100%	898.598.000	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Terlaksnanya penyusunan dokumen BMD	100%	2.275.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Terlaksnanya penyusunan dokumen BMD	100%	898.598.000	
1.	Penyusunan Standar Harga	Kab. Nganjuk	Jumlah standar harga yang disusun	52 dok	250.000.000	Penyusunan Standar Harga	Kab. Nganjuk	Jumlah standar harga yang disusun	52 dok	117.001.000	
2.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah rencana kebutuhan BMD	52 Dok	50.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah rencana kebutuhan BMD	52 Dok	35.000.000	

3.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dok	100.000.000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dok	150.000.000	
4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan BMD	52 laporan	400.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan BMD	52 laporan	240.000.000	
5.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	52 laporan	150.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil inventarisasi (LH) Barang Milik Daerah	52 laporan	40.001.000	
6.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengamanan BMD	4 laporan	800.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengamanan BMD	4 laporan	200.000.000	
7.	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil penilaian BMD dan hasil koordinasi penilaian BMD	30 laporan	175.000.000	Penilaian Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah laporan hasil penilaian BMD dan hasil koordinasi penilaian BMD	30 laporan	90.000.000	
8.	Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	26 dok	350.000.000	Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. Nganjuk	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan pemanfaatan pemindahtanganan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	26 dok	26.596.000	

Keterangan : Hasil Analisis telah dituangkan di aplikasi SIPD RI 2026

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L	N I H I L

Sumber: Hasil Forum Perangkat Daerah terhadap RKPD TA 2026

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026 mengangkat tema "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional tahun 2026 sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromarititm Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan; dan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan

pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah”, adapun sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah” dan “ Meningkatkan kualitas pengelolaan Aset daerah, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2026**
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan Pelaksanaan Penganggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	95 %
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Indeks Pengelolaan Barang Miik Daerah	80

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini. Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel (terlampir pada laporan ini).

3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2026, yaitu **“Peningkatan daya saing daerah dan Transformasi Pelayanan Publik.”**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan kesejahteraan sosial
3. Peningkatan kesempatan kerja;
4. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat;
5. Peningkatan kualitas Pendidikan;
6. Pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup;
7. Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah;
8. Peningkatan dan Penguatan Perekonomian Daerah;
9. Pengembangan Agropolitan dan food estate;
10. Pelestarian Seni Budaya Lokal;
11. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif;
12. Peningkatan Profesionalisme Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik;
13. Menjaga stabilitas sosial politik dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
14. Percepatan Transformasi Digital.

3.3.2 Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah telah masuk dalam program prioritas daerah.

Untuk pencapaian misi 2 **“Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalaui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif,partisipatif dan transparan”** dan program unggulan **2 “ Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi ”** dalam RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, telah dirumuskan tema **“Tata kelola keuangan daerah”**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan agar Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah telah masuk dalam program prioritas daerah dan Program Prioritas Daerah Pada Renja Perangkat Daerah.

Tabel 3.2

Program Prioritas Perangkat Daerah

Program	outcome	Indikator	Target Tahun 2026
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran	(1) Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	30 %
		2) Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40%
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	1) Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	80 %
		(2) Persentase Penurunan SILPA	5 %
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keungan tepat waktu	100%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	5%

3.3.3. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Visi RPD Kabupaten Nganjuk 2024-2026 adalah "Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju Adil Dan Sejahtera" yang dijabarkan ke dalam enam misi yang selanjutnya diselaraskan de ngan target TPB/*SDG's.*

Tabel 3.3

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)
Kabupaten Nganjuk

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Target 2023	Pelaksana
1.	Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (Tujuan 17)			
	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama			
	Jumlah kerjasama daerah yang difasilitasi	Jumlah MoU	1	BPKAD

Sumber: RAD TPB Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan fungsi keuangan.

Tabel 4.1

Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2026)
1.	Peningkatan Profesionalisme Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik	**265.888.005.965,17**

Tabel 4.2

Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Alokasi (2026
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Ketepatan Pelaksanaan Penganggaran dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	95 %	**265.888.005.965,17**
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	Indeks Pengelolaan Barang Miik Daerah	80 %	

Tabel 4.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
		Uraian (Output)	Target	
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			**265.888.005.965,17**
	Keuangan			
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**NILAI SAKIP**	**82**	**7.798.155.811,35**
I.	**Perencanaan Penganggaran dan**	**Persentase dokumen perencanaan**	**100%**	67.336.100

	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	**perangkat daerah yang tersusun**		
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	16.154.000
2.	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.948.300
3.	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dok	5.197.000
4.	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dok	4.620.700
5.	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dok	4.770.000
6.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	13.795.700
7.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan Evaluasi kinerja perangkat daerah	10 laporan	18.850.400
II.	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah**	**100%**	6.236.701.683,45
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	46 org/bln	6.200.624.583,45
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	18.092.500
3.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD	17 laporan	17.954.600

	bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD	dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD		
III	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi BMD perangkat daerah**	**100 %**	6.600.000
1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pentausahaan BMD pada SKPD	2 laporan	6.600.000
IV	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100%**	146.573.300
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-
2.	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	150 orang	38.098.300
3.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150 orang	108.475.000
V	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Fasilitasi dan Koordinasi bagian umum yang dilaksanakan perangkat daerah**	**100%**	242.124.528
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	4.720.654
2.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	4.740.150
3.	Penyediaan bahan logistik	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	101.215.074
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	8.182.800
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dok	3.000.000
6.	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	10 laporan	3.176.050

7.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	110.386.000
8.	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	200 dok	6.703.800
9.	Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dok	0
VI	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD SKPD yang diadakan**	**100%**	82.745.999,90
1.	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang disediakan	9 unit	0
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	10 unit	82.745.999,90
VII	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**100%**	695.082.500
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat menyurat	3 laporan	2.050.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	240.000.000
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	453.032.500
VIII	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase BMD pada SKPD yang dipelihara**	**100%**	320.991.700
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	18 unit	137.933.500
2.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	60 unit	4.996.200
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	60 unit	83.590.000
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	94.472.000

B	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**PERSENTASE KEPATUHAN OPD DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN KEUANGAN DAERAH SESUAI STANDART**	**100%**	257.191.252.153,82
IX	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Terlaksananya penyusunan dokumen anggaran daerah (APBD dan P. APBD)**	**100%**	1.028.466.953
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 dok	227.441.050
2.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	2 dok	233.705.950
3.	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi		
4.	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi		
5.	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi		
6.	Koordinasi Penyusunan dan verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi		
7.	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 dok	272.673.900
8.	Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang P.APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P,APBD	Jumlah Perda tentang P. APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran P. APBD	5 dok	294.646.053
9.	Koordinasi dan penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan Bidang Anggaran		
10.	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	208 orang	0
X	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Terlaksananya pembinaan OPD dalam pengelolaan keuangan daerah**	**100%**	283.480.850

1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	9000 dok	187.340.200
2.	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	208 dok	36.005.950
3.	Koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah dokumen hasil koordinasi fasilitasi asistensi sinkronisasi supervisi monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	92 dok	12.199.200
4.	Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank	Jumlah dokumen hasil koordinasi, pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan bukan bank	1 dok	12.806.000
5.	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	650 dok	8.781.500
6.	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	Jumlah petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban subkegiatan	5 dok	26.348.000
XI	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase dokumen Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun**	**100%**	326.670.700
1.	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah		
2.	Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi dan verifikasi aset kewajiban ekuitas pendapatan belanja pembiayaan	11 dok	13.313.000

	pendapatan-LO dan beban	pendapatan-LO dan beban		
3.	Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan Triwulanan dan Semesteran	4 laporan	31.570.000
4.	Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 dok	266.757.700
5.	Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	-	dihapus
6.	Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	2 dok	6.025.000
7.	Penyusunan Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah		
8.	Penyusunan Sistem dan prosedur akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan prosedur akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		
9.	Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan akuntansi pelaporan dan Pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten/Kota	150 orang	9.005.000
XII	**Penunjang Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**Terlaksananya penyaluran dana kewenangan pengelolaan keuangan daerah**	**100%**	255.532.428.650,82
1.	Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah laporan hasil Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	6 laporan	217.513.169.849

2.	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana darurat dan mendesak	4 laporan	10.423.615.401,82
3.	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	2 laporan	27.595.643.400
XIII	**Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan daerah**	**Persentase peserta yang mendapatkan pembinaan implementasi SIPD**	**100%**	20.205.000
1.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SIPD bidang keuangan daerah pemerintah Kabupaten/Kota	100 orang	20.205.000
C	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**PERSENTASE OPD YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN BMD SESUAI STANDAR**	**100%**	898.598.000
XIV.	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD Yang Menerapkan Pengelolaan BMD Sesuai Standar**	**100%**	898.598.000
1.	Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar harga yang disusun	52 dok	117.001.000
2.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan BMD	52 Dok	35.000.000
3.	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah	1 dok	150.000.000
4.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan penatausahaan BMD	52 laporan	240.000.000
5.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil inventaris (LH) Barang Milik Daerah	52 laporan	40.001.000
6.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan BMD	4 laporan	200.000.000
7.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Penilaian BMD dan hasil koordinasi Penilaian BMD	30 laporan	90.000.000
8.	Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil Optimalisasi penggunaan pemanfaatan Pemindahtanganan Pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	26 dok	26.596.000

Tabel 4.4

Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Penunjang Urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah					
	Analisis Perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Belanja Bantuan Keuangan	Bantuan Keuangan Umum	217.513.169.849	264 desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Belanja Tidak Terduga		10.423.615.401,82		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum
	Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Belanja Bagi Hasil	Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi	27.595.643.400	264 desa	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2026 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026; dan
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEPALA BPKAD

Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196840511 199202 2 001